

TINJAUAN EKONOMI PROVINSI RIAU

Wawan Hermawan

Dosen Fakultas Ekonomi Unpar

Abstract

Riau Province is one of the most faster income per capita growth in Sumatera Islands. The economic base of economic structure in Riau Province is Forestry Sector. This leading sector improve government income through Local Tax Income. This phenomenon, contradiction with inequality, unemployment, and poverty rate where in theoretically this indicators has negatif sign correlated with growth with income per capita, the reason of this fact because the income GDP from basis sector are centralized to capital owner.

Pendahuluan

Perekonomian merupakan suatu aktivitas yang akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Kemakmuran yang meningkat bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro dan sosialnya, sehingga dapat terukur bagaimana perekonomian tersebut meningkat atau tidak.

Provinsi Riau merupakan provinsi di pulau Sumatra yang kaya dengan kekayaan alamnya. Hutan merupakan suatu output yang menggerakkan perekonomian baik secara regional maupun nasional, disamping beberapa produk tambang lainnya.

Tinjauan ekonomi ini akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian Provinsi Riau dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, pemerataan ekonomi dan Struktur Keuangan Daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2005 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41%. Pertumbuhan ekonomi sebelum tahun 2005 hanya berkisar pada 2,5%, bahkan pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk sektor ekonomi di Provinsi Riau ada pada sektor Pengangkutan dan komunikasi serta sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai di atas 10%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini bahkan mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan baru mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2005.

Tabel 1.
Pertumbuhan PDRB dengan Migas Provinsi Riau
Atas Harga Konstan 2000 (%)

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	6,08	6,06	6,32	7,00	6,77
2. Pertambangan & Penggalian	(3,98)	0,43	(0,70)	(1,19)	3,71
3. Industri Pengolahan	3,56	2,24	5,81	9,53	5,60
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8,14	8,05	3,10	10,44	9,20
5. Bangunan	12,59	7,69	6,34	9,10	7,15
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	9,00	9,20	10,81	9,37	10,15
7. Pengangkutan & Komunikasi	10,81	11,50	11,20	11,85	10,29
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	12,31	12,96	12,86	18,92	18,18
9. Jasa-Jasa	8,13	8,06	6,87	9,06	7,89
PDRB Dengan Migas	(0,14)	2,66	2,45	2,93	5,41

Sumber : Riau dalam Angka

Perekonomian Provinsi Riau bisa dilihat dari kontribusi tiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Provinsi Riau. Tabel berikut menggambarkan kontribusi dari tiap sektor ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Provinsi Riau. Sub sektor Kehutanan merupakan kontributor terbesar kepada sektor pertanian disusul oleh sektor perkebunan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Provinsi Riau merupakan Pertanian dengan kekuatan pada sub sektor kehutanan dan perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan. Perkembangan sektor ini mencerminkan industri pengolahan berkembang cukup berarti di Provinsi Riau yang diperlihatkan dengan persentase yang mencapai 25% dari keseluruhan.

Sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Perkembangan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 memperlihatkan persentase yang cukup stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk sektor ini tidak mengalami perubahan.

Tabel 2**Kontribusi Sub Sektor PDRB Prov Riau Atas Harga Berlaku (%)**

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	51,61	49,16	42,42	45,20	44,86	45,46
2. Pertambangan & Penggalian	9,97	8,58	6,77	5,44	5,27	6,47
3. Industri Pengolahan	14,23	17,84	28,59	27,15	26,50	26,22
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,22	0,23	0,22	0,25	0,24	0,24
5. Bangunan	4,94	5,29	4,86	4,51	4,33	4,11
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	7,31	7,24	6,69	7,05	7,87	7,69
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,19	3,13	2,89	2,80	2,82	2,66
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	0,98	1,10	1,22	1,16	1,22	1,14
9. Jasa-Jasa	7,57	7,43	6,34	6,43	6,87	6,01
PDRB Dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Riau dalam Angka

Tabel 3**Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan Migas Provinsi Riau Atas Harga Berlaku (%)**

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. PERTANIAN	51,61	49,16	42,42	45,20	44,86	45,46
a. Tanaman Bahan Makanan	4,15	3,81	3,18	2,96	2,83	2,51
b. Tanaman Perkebunan	12,83	13,51	11,46	16,79	20,39	20,73
c. Peternakan dan hasil- hasilnya	2,10	1,96	1,65	1,64	1,56	1,41
d. Kehutanan	31,80	28,86	25,30	22,93	19,24	19,92
e. Perikanan	0,74	1,01	0,84	0,89	0,86	0,88

Sumber : Riau dalam Angka

Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi bisa digambarkan oleh variabel inflasi dan variabel tingkat pengangguran. Tingkat inflasi di Kota Pekanbaru sebagai ukuran inflasi di Provinsi Riau memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi (lebih dari 10%). Kecenderungan inflasi yang tinggi ini memperlihatkan tingkat harga-harga Provinsi Riau relatif sama dengan tingkat inflasi nasional.

Inflasi di kota Pekanbaru pada akhir 2005 (bulan Desember 2005 dengan tahun dasar 2002=100) tercatat inflasi umum sebesar 17,16 persen, bahan makanan (-3,87) persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,12 persen, air, listrik, gas, dan bahan bakar perumahan sebesar 0,64 persen, sandang sebesar 1,08 persen, kesehatan sebesar 1,27 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,14 persen dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,74 persen. Indeks harga konsumen di Pekanbaru pada akhir 2005 (bulan Desember 2005 dengan tahun dasar 2002=100) tercatat dengan rincian: untuk indeks umum 142,96; bahan makanan tercatat 137,25; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat 131,01; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 158,04; sandang 127,68; kesehatan 125,27; pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat 143,53 dan untuk transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 166,70.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau, memang memperlihatkan harga-harga barang secara umum lebih tinggi dari harga-harga di pulau Jawa. Hal ini bisa memperlihatkan tingkat daya beli yang relatif tinggi di Provinsi Riau. Tingkat harga-harga yang relatif tinggi ini bisa mengakibatkan insentif bagi perekonomian untuk lebih tinggi karena insentif harga atau bisa memperparah dari kalangan yang mempunyai tingkat pendapatan yang rendah.

Tabel 4
Tingkat Inflasi di Kota Pekanbaru Tahun 2005 (Dasar 2002 =100)

Bulan	Inflasi (Persen)
Januari	1,52
Februari	1,32
Maret	2,75
April	3,27
Mei	2,49
Juni	2,89
Juli	4,35
Agustus	5,55
September	5,89
Oktober	15,13
November	17,97
Desember	17,16

Sumber : Riau dalam Angka

Variabel kedua untuk melihat tingkat stabilitas ekonomi adalah pengangguran. Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional 2005 mencatat bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas tidak jauh berbeda di semua Kabupaten/Kota. Persamaan ini terlihat pada nilai persentase angkatan kerja yang tidak jauh berbeda dengan persentase bukan angkatan kerja, berkisar diantara 50 persen. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Kuantan Singingi dan Siak, masing-masing sebesar 55,29 persen dan 54,47 persen, sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Kampar dan Rokan Hilir, masing-masing sebesar 47,87 persen dan 49,10 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (52,24 persen), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 13,69 persen dan 12,65 persen.

Tingkat pengangguran di Provinsi Riau mencapai 13 persen pada tahun 2005 dimana angka ini merupakan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran di kota Dumai mempunyai tingkat pengangguran tertinggi dan terendah ada pada Kabupaten Indragiri Hulu. Pengangguran yang cukup besar ini bisa membuat perekonomian terganggu karena bisa memberikan dampak sosial yang tinggi. Tahun 2004 merupakan puncak dari pengangguran di Provinsi Riau yang mencapai 15,86%. Hal ini memberikan gambaran kestabilan ekonomi di Provinsi Riau cukup mengkhawatirkan, karena mempunyai tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi.

Tabel 5
Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau (%)

Kab/Kota	2002	2003	2004	2005
Kuantan Singingi	6,23	9,55	11,92	12,19
Indragiri Hulu	4,41	10,39	15,07	7,47
Indragiri Hilir	3,40	7,11	13,38	8,46
Pelalawan	6,99	9,66	8,06	9,29
Siak	4,72	11,73	14,93	10,56
Kampar	9,13	9,78	13,98	14,95
Rokan Hulu	3,84	7,75	10,92	9,80
Bengkalis	11,87	13,28	23,51	18,19
Rokan Hilir	7,85	14,88	17,73	17,16
Pekan Baru	15,20	13,94	17,17	13,21
Dumai	21,51	14,01	20,00	19,88
Provinsi Riau	8,81	10,97	15,86	13,06

Sumber : Riau dalam Angka

Pemerataan

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau didominasi oleh sektor pertanian, walaupun terjadi penurunan sampai dengan sebesar 50% pada tahun 2005. Hal ini mencerminkan pendapatan utama dari masyarakat di Provinsi Riau sangat tergantung pada sektor pertanian. Bila dihubungkan dengan kontribusi pada sektor pertanian yang besar, sub sektor kehutanan dan perkebunan diperkirakan menjadi sentra penyerapan tenaga kerja yang besar, karena sub sektor tersebut merupakan padat tenaga kerja.

Sektor perdagangan mempunyai kontribusi kedua terbesar dari penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sektor ini menyerap sekitar 14% sepanjang tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memiliki persentase yang sangat kecil sampai mendekati nol dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini karena perusahaan yang ada hanya sedikit dan merupakan perusahaan yang ada di bawah pemerintah.

Sektor-sektor lain banyak berkisar pada 5-6% dalam menyerap tenaga kerja. Sektor jasa memiliki fenomena yang menarik, yaitu mengalami kenaikan dalam rentang waktu tahun 2002-2005. Fenomena ini memberi gambaran bahwa sektor ini berkembang dan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja.

Tabel 6
Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Menyerap Tenaga Kerja
Di Provinsi Riau (%)

Sektor	2002	2003	2004	2005
Pertanian	63	51	53	50
Pertambangan	0	0	1	3
Industri	3	7	4	7
Listrik, gas dan air	0	0	0	0
Bangunan	4	4	5	8
Perdagangan	14	16	15	12
Angkutan	3	4	5	6
Keuangan	2	7	5	1
Jasa	9	9	13	13
Total	100	100	100	100

Sumber : Riau dalam Angka

Variabel lain dalam melihat pemerataan adalah jumlah masyarakat miskin di Provinsi Riau. Tabel di bawah ini menggambarkan persentase rumah tangga dan penduduk miskin pada tahun 2004. Penduduk miskin mencapai 22,19% pada tahun 2004. Data Penduduk miskin, pengangguran dan inflasi merupakan data dengan kategori tinggi di Provinsi Riau, tetapi bila melihat pendapatan per kapita menunjukkan angka yang cukup besar yaitu sekitar 17 juta pada tahun 2005.

Tabel 7**Jumlah Masyarakat Miskin Berdasarkan Hasil Penelitian Balitbang Provinsi Riau Tahun 2004**

Kab/Kota	RT Miskin 2004	Penduduk Miskin 2004	% Penduduk Miskin 2004
01. Kuantan Singingi	16.764	66.920	27,45
02. Indragiri Hulu	21.340	93.297	31,44
03. Indragiri Hilir	46.235	199.497	31,95
04. Pelalawan	10.064	40.631	18,39
05. Siak	13.331	62.715	21,91
06. Kampar	30.626	122.504	23,01
07. Rokan Hulu	17.878	71.006	20,84
08. Bengkalis	29.577	140.463	22,02
09. Rokan Hilir	21.155	95.932	21,76
10. Pekanbaru	16.158	76.841	10,91
11. Dumai	8.340	38.515	17,85
Provinsi Riau	231.468	1.008.163	22,19

Sumber: Paparan Gubernur Riau di Seskoad tanggal 25 Juni 2007

Tabel 8**Pendapatan Per Kapita Provinsi Riau menurut Harga Konstan 2000**

Tahun	Pendapatan Per Kapita
2000	18 526 761,03
2001	17 942 976,79
2002	17 931 656,84
2003	16 502 448,90
2004	16 642 317,78
2005	17 181 288,14

Sumber : Riau dalam Angka

Informasi lain untuk melihat bagaimana perekonomian di Provinsi Riau bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Model LQ ini memperlihatkan sektor mana saja yang menjadi basis dalam perekonomian di Provinsi Riau pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.

Sektor pertanian dan perdagangan merupakan basis dari perekonomian di Provinsi Riau. Sektor pertanian memiliki basis pada sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian pada bagian sebelumnya yang memperlihatkan kontribusi sub sektor ini yang besar. Sektor Industri pengolahan mempunyai basis hanya pada sub sektor pengilangan minyak bumi, sub sektor barang dari kayu dan sub sektor kertas.

Model LQ ini memperlihatkan hasil hutan dan kebun menjadi basis yang sangat besar dalam menunjang perekonomian di Provinsi Riau. Sektor-sektor lainnya tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian di Provinsi Riau bila dilihat pada Model LQ.

Tabel 8
Hasil Perhitungan LQ di Provinsi Riau

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
1. PERTANIAN	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Basis	Basis	Basis
a. Tanaman Bahan Makanan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Tanaman perkebunan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
d. Kehutanan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
e. Perikanan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Pertambangan & Penggalan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
a. Minyak dan Gas Bumi	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
b. Pertambangan tanpa Migas	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
c. Penggalan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Industri Migas	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Pengilangan Minyak Bumi	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
2. Gas Alam Cair	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Industri Tanpa Migas **)	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
4. Kertas dan Barang Cetakan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
5. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
7. Logam Dasar Besi & Baja	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
9. Barang lainnya	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis

4. Listyrik, Gas dan Air Bersih	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Listrik	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Gas	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
c. Air Bersih	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
5. Bangunan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Perdagangan Besar & Eceran	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Hotel	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
c. Restoran	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
7. Pengangkutan & Komunikasi	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Pengangkutan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Angkutan Rel	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Angkutan Jalan Raya	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
3. Angkutan Laut	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
5. Angkutan Udara	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
6. Jasa Penunjang Angkutan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Komunikasi	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Pos dan Telekomunikasi	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Jasa Penunjang Komunikasi	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
8. Keuangan, Persewaan, & JS. PRSH.	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Bank	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
c. Jasa Penunjang Keuangan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
d. Sewa Bangunan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
e. Jasa Perusahaan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis

9. JASA-JASA	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
a. Pemerintahan Umum	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Jasa Pemerintah lainnya	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
b. Swasta	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
1. Sosial Kemasyarakatan	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
2. Hiburan & Rekreasi	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis
3. Perorangan & Rumah tangga	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis	Non-Basis

Sumber : Pengolahan Data

Daya Dukung Riau

Provinsi Riau dalam melakukan pembangunannya memiliki daya dukung sebagai berikut :

- Era Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan yang semakin luas pada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sekaligus berimplikasi pada peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- Posisi strategis Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik sebagai kawasan yang dapat berperan penting di masa kini dan yang akan datang, yaitu terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN melalui hubungan kerjasama IMT-GT dan IMS-GT.
- Potensi sumberdaya alam yang meliputi: pertambangan (minyak bumi, batu bara, gas alam), perkebunan, kehutanan, kelautan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), di samping potensi sumberdaya olahan seperti infrastruktur, industri, pariwisata dan lain-lain.

Struktur Keuangan Daerah

Struktur keuangan pemerintah Provinsi Riau diperlihatkan oleh dua tabel di bawah ini. Tabel pertama memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau pada tahun 2005 mencapai 23,42 persen. Kontribusi tertinggi dari PAD berasal dari pajak daerah yang mencakup 85 persen dari PAD atau 19,96 persen dari total penerimaan. Tingkat PAD sebesar itu (lebih dari 20%) termasuk tinggi bila dibandingkan dengan nasional yang berkisar 10%.

Pos penerimaan lain berupa Dana Pembagian/Perimbangan yang merupakan bagian terbesar dari penerimaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase hanya 2,8 persen dari total penerimaan. Kecilnya DAU ini disebabkan oleh Pos bagi hasil bukan pajak yang diperoleh Provinsi Riau sangat besar akibat dari sumber alam yang cukup tinggi potensinya.

Persentase Pos bagi hasil bukan pajak mencakup 43,96 persen dari total penerimaan sehingga Provinsi Riau sangat tergantung pada kekayaan alam terutama berupa hutan dan minyak.

Tabel 9
Realisasi Penerimaan menurut Jenis
Provinsi Riau Tahun 2005

Jenis Penerimaan	Ribu Rupiah	Persen
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rutin Tahun Lalu		614.741.025,48 18,71
PAD		69.561.702,44 23,42
Pos Pajak Daerah	655.884.681,67	19,96
Pos Retribusi Daerah	30.285.178,51	0,92
Pos Usaha Daerah	25.144.358,57	0,77
Pos Lain-lain Pendapatan	58.247.483,69	1,77
Dana Pembagian/Perimbangan		.783.743.460,90 54,27
Pos Bagi Hasil Pajak	246.733.406,95	7,51
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	1.444.853.053,95	43,96
Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	92.157.000,00	2,80
Lain-Lain Penerimaan		18.457.000,00 3,60
Total		3.286.503.188,82 100,00

Sumber : Riau dalam Angka 2005

Realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Riau memperlihatkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan. Hal ini memberikan surplus sebesar kurang lebih 848,8 milyar rupiah. Keadaan ini sama dengan tahun lalu yang memberikan surplus juga sebesar 614 milyar. Keadaan keuangan ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi untuk bisa mengalokasikan pengeluarannya pada sektor-sektor yang produktif dan investasi pembangunan.

Belanja pelayanan publik merupakan porsi terbesar dari pengeluaran pemerintah provinsi yang mencakup 70,75 persen dari total pengeluaran. Sedangkan belanja modal mencapai 37,4 persen. Hal ini mengindikasikan perhatian pemerintah provinsi dalam membuat pengeluaran yang berorientasi investasi publik hanya sebesar 37,4%.

Tabel 10
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah menurut Jenis
Provinsi Riau 2004/2005 (Ribu Rupiah)

	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Persen
1	2	3	4
1.	APARATUR DAERAH Regional Government	712,988,195.49	29.25
1.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM Public Administration Expenditure	435,634,764.65	17.87
1.1.1	Belanja Pegawai/Personalialia Government Expenditure	288,100,847.82	11.82
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	81,822,632.76	3.36
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	34,203,275.44	1.40
1.1.4	Belanja Pemeliharaan Maintenance Expenditure	31,508,008.63	1.29
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan Maintenance Operation Expenditure	161,760,236.96	6.64
1.2.1	Belanja Pegawai/Personalialia Government Expenditure	77,633,776.04	3.18
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	59,595,693.56	2.44
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	21,970,677.60	0.90
1.2.4	Belanja Pemeliharaan Maintenance Expenditure	2,560,089.76	0.11
1.3	BELANJA MODAL Maintenance Operation Expenditure	115,593,193.88	4.74
			-
2.	Pelayanan Publik Public Services	1,724,736,633.43	70.75
2.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM Public Administration Expenditure	14,064,202.76	0.58
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalialia Government Expenditure	-	-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	11,591,595.43	0.48
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
2.1.4	Belanja Pemeliharaan Maintenance Expenditure	2,472,607.33	0.10
2.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Public Administration Expenditure	271,879,609.19	11.15
2.2.1	Belanja Pegawai/Personalialia Government Expenditure	82,660,391.06	3.39
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	173,463,227.08	7.12

2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	13,646,547.90	0.56
2.2.4	Belanja Pemeliharaan Maintenance Expenditure	2,109,443.15	0.09
2.3	BELANJA MODAL	910,265,872.79	37.34
2.4	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	525,998,856.76	21.58
2.5	BELANJA TIDAK TERSANGKA	2,528,091.93	0.10
		2,437,724,828.92	100.00

Sumber : Riau dalam Angka 2005

Kesimpulan

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Provinsi Riau. Sub sektor Kehutanan merupakan kontributor terbesar kepada sektor pertanian disusul oleh sektor perkebunan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Provinsi Riau merupakan Pertanian dengan kekuatan pada sub sektor kehutanan dan perkebunan.

Tingkat inflasi di Kota Pekanbaru sebagai ukuran inflasi di Provinsi Riau memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi (lebih dari 10%). Kecenderungan inflasi yang tinggi ini memperlihatkan tingkat harga-harga Provinsi Riau relatif sama dengan tingkat inflasi nasional. Tingkat pengangguran di Provinsi Riau mencapai 13 persen pada tahun 2005 dimana angka ini merupakan tingkat pengangguran yang cukup tinggi

Kestabilan ekonomi di Provinsi Riau cukup mengkhawatirkan, karena mempunyai tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi.

sub sektor kehutanan dan perkebunan diperkirakan menjadi sentra penyerapan tenaga kerja yang besar, karena sub sektor tersebut merupakan padat tenaga kerja.

Penduduk miskin mencapai 22,19% pada tahun 2004. Data Penduduk miskin, pengangguran dan inflasi merupakan data dengan kategori tinggi di Provinsi Riau, tetapi bila melihat pendapatan per kapita menunjukkan angka yang cukup besar yaitu sekitar 17 juta pada tahun 2005.

Sektor pertanian dan perdagangan merupakan basis dari perekonomian di Provinsi Riau. Sektor pertanian memiliki basis pada sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian pada bagian sebelumnya yang memperlihatkan kontribusi sub sektor ini yang besar. Sektor Industri pengolahan mempunyai basis hanya pada sub sektor pengilangan minyak bumi, sub sektor barang dari kayu dan sub sektor kertas.

Anggaran dari Provinsi Riau mengalami surplus yang besar pada tahun 2005 (848,8 milyar rupiah) dan perhatian pemerintah provinsi dalam membuat pengeluaran yang berorientasi investasi publik hanya sebesar 37,4%.

Daftar Pustaka:

- Aklilu A Zegeye, "Saving And Growth Functions". *International Economic Journal* 1994
- Alex Winter-Nelson, "Natural Resources, National Income, And Economic Growth in Africa"
- Bank Indonesia, *Laporan Triwulan*, Berbagai Terbitan
- Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Edisi 2006.
- J.S. Uppal, "Income Distribution, Poverty and Economic Growth in Indonesia"
- Moh. Ikhsan Mahyudin, *Pelarian Modal dari Indonesia, Estimasi dan Masalah*, Jurnal EKI no. 1 tahun 1989
- Paparan Gubernur Provinsi Riau di Seskoad tanggal 25 Juni 2007
Riau dalam Angka tahun 2006
- Robert Mundell, *The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policies for Internal and External Balance*, IMF Staff Papers, March 1962
- Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., *Ekonomi*, Jilid 2, Erlangga,
- Sudjana, *Statistik untuk Ekonomi dan Niaga*, Edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1982.